

Bank dan Lembaga Keuangan Lain



PERKEMBANGAN PERBANKAN DI INDONESIA

PERKEMBANGAN EKONOMI, PERDAGANGAN DAN LEMBAGA-LEMBAGA KEUANGAN PADA ZAMAN PENJAJAHAN DAN DI NEGARA-NEGARA SEDANG BERKEMBANG

- ▶ **PERKEMBANGAN MULA-MULA SEBELUM PENJAJAHAN BELANDA**

Kehidupan perbankan dan lembaga-lembaga keuangan/pembiayaan mulai sejak VOC beroperasi di bumi Nusantara, VOC disamping fungsinya yang pokok sebagai lembaga perdagangan, juga melaksanakan fungsi lembaga keuangannya sendiri. Banyak fungsinya yang kemudian hari berkembang menjadi fungsi-fungsi yang dijalankan oleh bank-bank umum/ dagang atau bank yang khusus membiayai perkebunan.

▶ PERKEMBANGAN PERBANKAN, KREDIT DAN SISTEM PEMBAYARAN

Dalam perkembangannya, VOC mengalami kebangkrutan dan selanjutnya pemerintah Hindia Belanda mengambil alihnya, pada masa berlakunya sistem mekanisme pasar, masa sistem tanam paksa, maupun pada masa kebijakan penanaman modal asing.

Selama periode sistem tanam paksa serta sebelumnya dimana para petani bekerja secara bebas atas dasar mekanisme paksa, unsur pembiayaan tidak begitu tampak dan sukar dikembangkan.

Lanjutan...

Sebelum pertengahan abad ke-19, perbankan di Hindia Belanda sebagian besar dilakukan oleh De Javasche Bank (JB) dan Nederlansche Handel Maatschappij (NHM) yang merupakan bank-bank resmi yang memberikan kredit uang muka kepada pemborong-pemborong pemerintah.

Perkembangan ekspor hasil-hasil perkebunan membutuhkan pembiayaan, lalu didirikan Escompto Bank, Rotterdamsche Bank (RB) dan Internatio, serta beberapa bank swasta dan dua cabang bank Inggris.

Lanjutan...

Semenjak permulaan abad ke-20, JB mulai menarik diri dari perdagangan umum dan mulai berspesialisasi menjadi “The Banker’s Bank”, yaitu banknya bank-bank lain. Agar Jb berspesialisasi mengatur keadaan ekonomi, menjaga kestabilan nilai rupiah dan sebagainya maka sebaiknya bank ini bespesialisasi sebagai bank sentral. Sehingga JB diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda.

▶ KREDIT PRODUKTIF USAHA GOLONGAN KECIL

Perekonomian kita sejak dahulu didasarkan pada satuan usaha kecil. Untuk mengembangkan usaha kecil, sejak pertengahan abad ke-19 dan awal abad ke-20, didirikan Algemene Volkrediet Bank (AVB) atau Bank Rakyat yang berbeda tujuannya dari Jawatan Pegadaian yang umumnya memberikan kredit untuk tujuan konsumtif dan meniadakan lintah darat.

Tujuan AVB membantu memajukan kegiatan usaha rakyat kecil yang produktif.

PERKEMBANGAN LEMBAGA-LEMBAGA KEUANGAN DAN BANK SESUDAH KEMERDEKAAN

▶ LEMBAGA-LEMBAGA PERBANKAN DAN PERKREDITAN PERIODE TAHUN 1960-1966

Pada awal kemerdekaan , lembaga keuangan dan perbankan masih mewarisi keadaan jaman penjajahan yang didominasi oleh bank-bank swasta milik Belanda dan beberapa bank asing lain. Sesudah itu, dilakukan nasionalisasi atas bank-bank tersebut. Hanya satu bank yang bukan merupakan hasil nasionalisasi yaitu BNI 1946 dan sempat menjadi bank sirkulasi selama pendudukan.

JB menjadi Bank Indonesia sebagai bank sentral
NHM menjadi bank Rakyat Indonesia
Escompto menjadi Bank Umum Negara

▶ PERKEMBANGAN KEBIJAKAN EKONOMI MONETER DAN PERBANKAN

Kebijakan dan struktur perkreditan yang merupakan bagian dari kebijakan ekonomi dan pembangunan mengalami perkembangan. Hal ini dapat dibedakan menjadi tiga periode :

- a. Periode pertama (sejak tahun 1950–1959) selama periode pertama, kebijakan ekonomi dan pembangunan banyak bersifat liberal disertai dengan usaha memperkuat kegiatan ekonomi nasional pribumi yang umumnya meruapakn golongan ekonomi lemah.

Lanjutan ...

b. Periode kedua (sejak tahun 1959–1965)

Periode kedua ditandai oleh etatisme yang tercermin dalam periode sosialisme Indonesia, dengan ciri berupa banyaknya pengaturan dan campur tangan langsung oleh negara di bidang produksi dan distribusi termasuk perkreditan. Campur tangan dibidang ekonomi termasuk perkreditan dan moneter menyebabkan penyelewengan dan penyalahgunaan.

Lanjutan ...

- c. Periode ketiga (sejak tahun 1966–sekarang)
Pemerintah orde baru sejak tahun 1966 mulai merasionalkan fungsi perbankan serta kebijakan ekonomi dan pembangunan, mempercayakn pada mekanisme pasar dan mendorong efisiensi. Lalu kemudian dilakukan penataan kembali sistem moneter, perbankan dan perkreditan. Tingkat suku bunga deposito dan pinjaman yang ditentukan sangat rendah dan tidak rasional telah dinaikkan secara dramatis pada pertengahan tahun 1968. Tindakan moneter ini juga merupakan bagian dari program anti inflasi yang dilancarkan pada waktu itu. Kebijakan penetapan besarnya bagian kredit likuiditas bank Indonesia untuk selanjutnya merupakan inti kebijakan kredit dan perbankan

ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA

▶ BASEL CORE PRINCIPLES

The Basel Committee on Banking Supervision adalah sebuah komite otoritas pengawas perbankan yang didirikan oleh gubernur bank sentral dari negara-negara G-10 pada tahun 1975. Lembaga ini terdiri dari wakil-wakil senior dari otoritas pengawas perbankan dan bank sentral dari negara-negara anggota G-10, dan juga telah mencari cara untuk menguatkan stabilitas keuangan selama bertahun-tahun baik secara langsung maupun melalui kerjasamanya dengan pengawas perbankan di seluruh dunia.

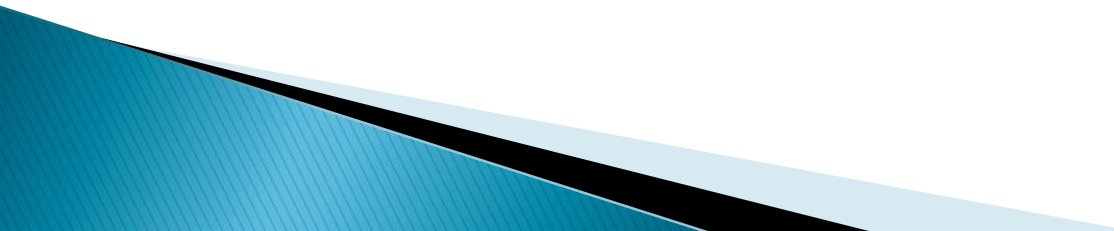
Lanj...

Komite ini telah menyusun 2 jenis dokumen yaitu:

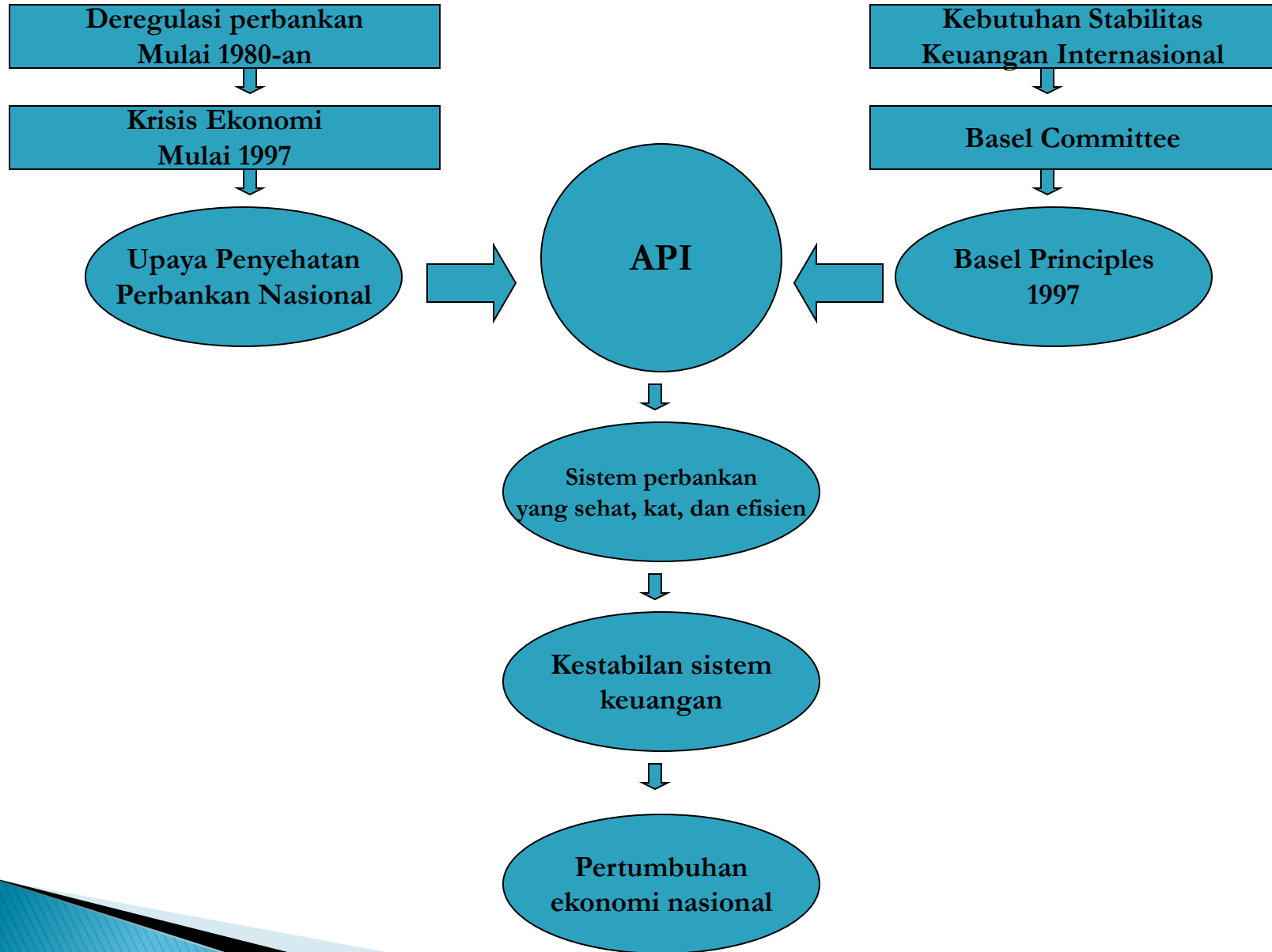
1. Paket lengkap core principles for effective banking supervision
2. Compendium(akan diperbaharui secara periodik) terhadap semua rekomendasi, pedoman dan standar yang telah dikeluarkan oleh Basel Committee yang sebagian besar saling berkaitan dengan core principles.

- ▶ The Basel Core Principles terdiri dari 25 prinsip dasar yang perlu ada bagi terwujudnya sistem pengawasasn yang efektif. Prinsip–prinsip tersebut dikatakan dengan:
 1. Prasyarat bagi pengawasan perbankan yang efektif (1)
 2. Perizinan dan struktur (2–5)
 3. Peraturan prinsip kehati–hatian (6–15)
 4. Metode pengawasan perbankan terus–menerus (16–20)
 5. Informasi (21)
 6. Wewenang formal pengawas (22)
 7. Pernankan lintas negara (23–25)

Pengertian API

- ▶ API merupakan suatu kerangka dasar pengembangan sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh untuk rentang waktu 5–10 tahun ke depan.
 - ▶ Visi API: menciptakan perbankan sehat, kuat dan efisien demi kestabilan keuangan dan pertumbuhan.
- 

Sistematika Arsitektur Perbankan Indonesia



Enam Pilar API

Sistem perbankan sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Pilar 1
Struktur
perbankan
yang sehat

Pilar 2
Sistem
pengaturan
yang efektif

Pilar 3
Sistem
Pengawasan
Independen
dan efektif

Pilar 4
Industri
Perbankan
yang kuat

Pilar 5
Infrastruktur
Pendukung
yang
mencukupi

Pilar 6
Perlindungan
konsumen

Tantangan ke Depan

1. Pertumbuhan kredit perbankan yang masih rendah
2. Struktur perbankan yang belum optimal
3. Pemenuhan kebutuhan layanan perbankan yang masih kurang
4. Pengawasan bank yang masih perlu ditingkatkan
5. Kapabilitas perbankan yang masih lemah
6. Profitabilitas dan efisien bank yang tidak mampu bertahan
7. Perlindungan nasabah yang masih harus ditingkatkan
8. Perkembangan teknologi informasi

Program Kegiatan API

Pelaksanaan keenam pilar API dijabarkan lebih rinci oleh Bank Indonesia dalam program kegiatan pada rentang waktu 10 tahun (2004–2013). Program tersebut adalah:

1. Program penguatan struktur perbankan nasional
2. Program peningkatan kualitas pengaturan perbankan
3. Program peningkatan fungsi pengawasan
4. Program peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan
5. Program pengembangan infrastruktur perbankan
6. Program peningkatan perlindungan nasabah

Tahap-tahap Implementasi API

Mengingat panjangnya rentang waktu implementasinya dan untuk menjaga agar pencapaian target lebih dapat termonitor, program implementasi API dilaksanakan secara bertahap dan dimulai tahun 2004:

1. Penguatan struktur perbankan nasional
2. Peningkatan kualitas pengaturan perbankan
3. Peningkatan fungsi pengawasan
4. Peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan
5. Pengembangan infrastruktur perbankan
6. Peningkatan perlindungan nasabah

Terimakasih....

